

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 landasan Teoritis

2.1.1 Teori Modal

Modal adalah sarana yang digunakan untuk dapat memiliki peran ataupun mendominasi suatu keadaan di dalam masyarakat hal ini sesuai dengan pendapat Pierre Bourdieu mengatakan bahwasanya kepemilikan sumber daya (Modal) adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh individu ataupun kelompok yang menjadi aktor politik dalam mencapai dan meraih kekuasaan. Dimana Pierre juga mengatakan bahwasanya fungsi modal adalah sebagai sebuah relasi sosial dalam system pertukaran yang menggambarkan dirinya sebagai sesuatu yang langka dan juga layak dicari dalam posisi sosial tertentu (Nurnazmi & Siti Kholifah, 2023).

Modal yang ada tadi tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan karena adanya suatu hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan dimana kekuasaan tidak hanya bersumber pada nilai material tetapi juga diperkuat dengan faktor - faktor pendukung lainnya. Hal ini membuka pandangan baru dibalik pandangan tradisional yang banyak berkembang bahwa kekuasaan hanya bersumber pada ekonomi saja, tetapi ketika merujuk kepada teori modal yang baru individu ataupun aktor politik yang tidak memiliki sumber daya ekonomi mampu untuk mendapatkan kekuasaan dan juga mempertahankan kekuasaan tersebut. Teori modal ini merupakan bentuk perbedaan dari pandangan Karl Max yang selalu

menyatakan bahwa ekonomi adalah faktor utama dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Nurnazmi & Siti Kholifah, 2023).

Penggunaan modal sebagai komoditas kekuasaan menurut Bourdieu adalah sesuatu yang bersifat akumulatif, bisa diwariskan dan juga dapat diatur posisinya, artinya hal ini menunjukkan bahwa modal dapat diperoleh dengan ketentuan dan syarat yang terdapat dalam ruang sosial atau kelas sosial dimana modal tersebut dihargai sebagai suatu bentuk sarana yang dibutuhkan oleh aktor politik. Modal sebagai alat kekuasaan yang penting dalam mencapai jabatan politik dijadikan sebagai salah satu strategi dan juga sumber dalam menciptakan ruang-ruang politik dan juga dalam membentuk kelas sosial. Menurut Bourdieu sendiri modal ini selalu berkaitan dengan teori arena¹¹ dan juga habitus¹² yang memang saling berkaitan, jika teori arena sebagai tempat dan sarana sedangkan habitus sebagai suatu karakteristik dari terciptanya kelas sosial maka teori modal ini sebagai pelengkap utama dalam mencapai kekuasaan dalam masyarakat (M.NajibYulianto,2016).

Praktik politik dalam pelaksanaannya memang membutuhkan berbagai sarana pendukung untuk mendapatkan kekuasaan adalah suatu hal yang lumrah dan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan bagaimana kekuasaan itu kedepannya dilakukan, maka modal sebagai sarana pendukung dan juga penunjang seorang aktor politik dalam mencapai

¹¹ Teori Arena adalah struktur relasi sosial, situasi tempat habitus mengambil energi kekuasaan seraya menempuh strategi

¹² Habitus merupakan struktur yang menjadi prasyarat bagi keberadaan karakteristik suatu kelas

kekuasaan memerlukan suatu usaha dan kolaborasi dengan berbagai bentuk kepentingan yang dibawa oleh seorang aktor politik. Bentuk – bentuk kepentingan yang dibawa oleh aktor politik ini selalu berkaitan dengan bagaimana kekuasaan dan juga cara mempertahankan kekuasaan. Semakin kokoh suatu modal yang dimiliki oleh aktor politik maka semakin kokoh pula kekuasaan politik yang di dapat nya (Amalia Syauket, 2021).

Beberapa jenis modal yang dimaksud oleh Bourdie yang dapat digunakan oleh individu atau kelompok dalam mencapai dan juga mendapatkan kekuasaan merupakan sesuatu yang dapat ditukarkan dengan jenis modal lainnya hal ini juga dapat menimbulkan pertukaran paling dramatik dalam sebuah teori modal dimana pertukaran ini terjadi dalam bentuk simbolik, dimana bentuk bentuk modal sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

Modal ekonomi dimana bentuk dari modal ini yaitu materil dan juga memiliki nilai simbolik dan juga dalam berbagai bentuk atribut yang tidak dapat tersentuh. Modal ekonomi dapat dikonversikan kedalam uang dan dapat dijadikan sebagai bentuk hak milik, beberapa modal lain yang dibicarakan oleh bourdie dapat dikonversikan menjadi sebuah modal ekonomi seperti modal budaya pada kondisi tertentu dapat dikonversi pada modal ekonomi dan dapat dikualifikasikan dalam bentuk kualifikasi Pendidikan, dan sebagai modal sosial terdiri dari kewajiban kewajiban sosial yang pada keadaan tertentu dapat dikonversi menjadi modal ekonomi

dan dapat dilembagakan dalam bentuk gelar kebangsawanan (M.Najib Yuliantoro,2016).

Modal budaya bentuk dari modal budaya ini yaitu dapat di identifikasikan dalam bentuk selera dan juga konsumsi dengan cakupan yang sangat luas seperti proferti, pendidikan dan juga bahasa. Sedangkan dalam pandangan Bourdie mengatakan bahwasanya modal budaya eksis dalam tiga bentuk yaitu terintegrasi dalam diri, berbentuk system disposisi yang tahan lama dalam tubuh dan pikiran, seperti jujur, suka menolong, dan bijaksana. Tipologi modal pertama ini melekat dalam diri seorang aktor individu dalam mencapai kekuasaan, tetapi hal ini memiliki suatu konsekuensi bahwa tipologi pertama ini tidak mudah untuk didapat, dijual, dan juga diberikan dengan cara yang instan. Ke dua bersifat objektif yaitu dimana segala sesuatu yang dianggap baik dalam budaya seperti sebuah karya ilmiah, buku, tulisan dan secara material dapat ditukar menjadi modal ekonomi. Secara material dan simbolik modal budaya objektif bersifat aktif, efektif, dipertaruhkan dan juga diperjuangkan. Ke tiga yaitu bersifat institusional yakni dalam aturan aturan tertentu yang diasumsikan memberi jaminan mutu secara sosial tetapi kualifikasi pendidikan dianggap sebagai cara paling efektif dalam mengetahui kompetensi budaya.

Modal simbolik lebih tertuju pada sisi kederajatan manusia dalam tatanan kehidupan seperti ketersohoran dan juga kehormatan, hal lainnya dalam modal simbolik ialah tidak dapat terlepasannya bagian kekuasaan dengan derajat modal simbolik sendiri. Modal simbolik sendiri berada

dalam kapasitas kognitif karena perkaranya adalah ke absahan atau ke tidak absahan dalam mengakui dan juga mengenali modal simbolik oleh logika pengetahuan.

Modal sosial dengan berbagai bentuk jaringan yang sangat luas dengan keterkaitan dengan sumber daya lainnya, terutama yang berkaitan dengan para penguasa, tetapi secara umum modal sosial mengandung unsur kepercayaan, solidaritas, loyalitas, dan koneksi, sehingga dapat menjamin penerimaan eksistensi dalam ranah ranah sosial yang berkaitan dengan keluarga, kelas sosial, partai, jaringan serta relasi ini memang sangat diperlukan dalam membentuk jaringan sosial. Karena semakin tinggi relasi yang dibuat maka kuat pula pengaruh aktor politik dalam membentuk dan menyatukan modal lainnya.

Ke empat jenis modal di atas merupakan sarana penunjang yang paling baik menurut teori Pierre Bourdieu dalam mendapatkan kekuasaan hal lainnya dari teori ini yaitu bagaimana ketimpaan sosial dan juga kelas dapat di produksi juga di pertahankan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam bentuk ke empat modal di atas untuk dapat terus mempertahankan kekuasaan nya salah satunya dengan membentuk politik dinasti. Teori ini sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis tentang modal Kepala Desa Sumpinghayu yakni Sanen dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan sehingga terbentuk dinasti politik.

2.1.2 Kekuasaan Elite

Kekuasaan dapat diartikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu ataupun tindakan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok dalam menjalankan kewenangan yang telah diperolehnya, kewenangan juga dapat diartikan sebagai salah satu cara mempengaruhi orang lain yang dimiliki oleh individu atau kelompok, oleh karena itu biasanya orang yang memiliki kekuasaan disebut penguasa dimana ia memiliki tanggung jawab yang besar dalam kapasitasnya sebagai orang yang telah diberikan kewenangan. Legitimasi atas kekuasaan muncul seiring dengan bagaimana seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik (Risvandi & Andri, 2022).

Posisi kekuasaan yang besar dalam struktur kehidupan manusia secara nyata dapat dilihat dalam bentuk pemerintahan, dimana pemerintahan adalah pemegang kendali dalam struktur kekuasaan, dalam ranah negara pemerintah adalah pengatur segala bentuk kekuasaan di masyarakat, hal ini karena kewenangan dan kepercayaan tersebut diatur melalui peraturan per undang-undangan ataupun melalui wakil rakyat di badan legislatif, kekuasaan tertinggi sebenarnya adalah rakyat sebagai pemegang kendali yang utama dalam kekuasaan negara sekalipun, tetapi pada realitanya dalam kekuasaan selalu hadir dan muncul sosok sebagian minoritas masyarakat untuk dapat mengendalikan kekuasaan hal ini disebut dengan kekuasaan selalu diperintah oleh sebagian kelompok atau elite (Risvandi & Andri, 2022).

Penguasa sebenarnya menjadi objek dan subjek yang paling menguntungkan dimana kedudukan, kepercayaan dan harta benda yang lebih besar dapat diterima sebagai bagian kompensasi atas kepercayaan mendapatkan kekuasaan tersebut. Maka dari itu, sering sekali banyak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan penguasa berkaitan dengan kolusi, korupsi dan nepotisme karena adanya kemudahan terhadap akses dan pengelolaan terhadap sumber daya sehingga bukan tidak mungkin bahwasanya praktik dinasti politik adalah salah satu dari hasil kekuasaan tersebut.

Kekuasaan yang ada dan muncul tidak bisa dilepaskan dengan cara mendapatkan kekuasaan dan sumber kekuasaan. Hal senada juga sesuai dengan kosep kekuaasan dari (Haryanto, 2017) bahwa dalam kekuasaan tidak bisa dipisahkan dalam suatu dimensi kekuasaan yang di dalam nya terdapat 4 macam dimensi yaitu pertama potensial dan aktual. Dimensi ini berkaitan dengan kekuasaan dan dianalogikan sebagai sebuah energi, kekuasaan potensial merupakan kekuasaan yang masih tersimpan dan belum di oleh sedangkan di sisi lain kekuasaan potensial ini menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki sumber daya yang besar dalam kekuasaan dan di perkuat dengan kekuasaan aktual dimana kekuasaan aktual ini merupakan tenaga yang dihasilkan dari energi tadi ataupun hasil dari kekuasaan potensial.

Kekuasaan potensial dalam realitas kehidupan merupakan akumulasi dari beberapa sumber yang memungkinkan seseorang untuk

mendapatkan kekuasaan sumber - sumber tersebut adalah kekayaan, informasi, ataupun pengetahuan. Sumber tersebut jika tidak digunakan dalam ranah politik, tetap hanya akan menjadi sumber yang tidak optimal dalam kekuasaan tetapi jika sumber tersebut digunakan dengan baik dan mencapai tujuan dari politik maka kekuasaan potensial tersebut telah menjadi kekuasaan yang aktual.

Kekuasaan potensial dan aktual yang sudah dilakukan dengan baik tadi akan menghasilkan suatu jabatan akan pribadi dimana perubahan yang besar ini dilakukan oleh individu yang memiliki nilai konrit yang besar dan bukan organisasi yang abstrak atau kaku. Individu yang melakukan kegiatan politik berdasar pada sumber kekuasaan potensial dan aktual tadi dengan sesuai dan mendapatkan kekuasaan atau jabatan secara otomatis akan mendapatkan hak pribadi sebagai penguasa dalam menentukan kebijakan dan kewenangan yang di embannya dan hasil yang akan muncul akibat dari kewenangan dan kebijakan yang dibuat bergantung kepada kualitas individu ini (Haryanto, 2017).

Penggunaan kekuasaan yang didapatkan tidak bisa dipisahkan dari sisi yang paling dasar kekuasaan yaitu kepentingan dan keuntungan, kekuasaan sebagai bagian dari akhir politik memang selalu di dasarkan pada dua aspek yaitu aspek paksaan dan juga aspek konsesus. Dimana kekuasaan yang berdasar kepada aspek paksaan di dalam nya selalu dibarengi dengan pandangan politik yang penuh dominasi dan konflik akan kepentingan dan merugikan seluruh komunitas yang ada di dalamnya karena hal yang ingin

dicapai bukan merupakan kesepakatan dari semua pihak komunitas, sedangkan aspek konsesus merupakan pandangan politik yang di dalamnya tidak penuh dengan pergulatan kepentingan elite tetapi mencapai tujuan bersama semua komunitas.

Hubungan yang besar antara penguasa dan rakyat merupakan suatu keniscayaan dan selalu melahirkan suatu keadaan tertentu yang melahirkan elite sebagian bagian dari kekuasaan tersebut. Elite dapat diartikan sebagai status yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok dalam kedudukan sosial dimasyarakat baik dalam kekuasaan, ekonomi, politik atau dalam jabatan profesional yang berada dalam lapisan atas. Kalangan elite sendiri sulit untuk di akses oleh masyarakat pada umumnya, sehingga elite ini adalah kalangan minoritas yang sering memerintah kalangan mayoritas. Hal ini sesuai dengan salah satu teori elite yang digagas oleh tokoh politik dan professor yang bernama Guetano Mosca menyatakan bahwa setiap masyarakat selalu terbagi ke dalam dua bagian yaitu minoritas yang mengendalikan pemerintahan dan mayoritas yang di perintah oleh minoritas (Haryanto, 2017).

Fenomena minoritas menguasai mayoritas tidak terlepas karena dua alasan yaitu pihak minoritas mampu untuk mengorganisir diri dibandingkin pihak mayoritas hal ini di ibaratkan dengan “Seratus orang yang memiliki kesamaan pemahaman saat melakukan aksi Bersama di sebuah konser selalu menang atas ribuan orang yang tidak terorganisir”, Para anggota dari minoritas yang memerintah punya atribut yang berpengaruh di mata

masyarakat tempat mereka hidup, hal tersebut tidak semata di fokuskan pada pemegang jabatan tinggi tetapi juga kelas dari tempat pemegang jabatan tersebut berasal (Marlinda Irawati, 2021).

Formula politik sebagai bagian dari Elite selalu dibalut dengan propaganda yang digunakan oleh para elite untuk memprakasai dan melestarikan Formula politik tersebut agar memperoleh legitimasi dari tempat dan lingkungan nya tinggal. Tetapi dalam sisi lain formula politik seperti ini dapat digunakan oleh elite untuk melengserkan elite lainnya dalam periode tertentu. Walaupun elite yang memerintah memiliki kesempatan untuk mentrasfer formula politik ke anak cucunya, tetapi telah banyak sejarah yang membuktikan bahwa kerap terjadi perubahan kekuasaan dari satu elite ke elite yang lainnya. Hal tersebut memang tidak terlepas karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti adanya progresivitas dari manusia, adanya formula politik yang di anggap lebih baik, dan perubahan peradaban yang terjadi pada umat manusia (Haryanto, 2017).

Progresivitas yang terjadi dalam suatu perubahan peradaban kadang juga menghasilkan suatu retrogresif atau kemunduran peradaban, contoh dari kemunduran suatu peradaban atau retrogresif yaitu eropa mengalami kemunduran peradaban setelah runtuhnya kekaisaran romawi ataupun timur tengah yang mengalami kemunduran pasca runtuhnya kekhalifahan islam, walaupun setelah nya juga terjadi kemajuan peradaban yang lebih baik khususnya di eropa. Mosca dalam pandangan nya berkaitan dengan elite

tidak terlepas dari system demokrasi perwakilan yang memang pada saat itu sedang berkembang di wilayah Italia, hal ini tidak terlepas karena adanya kasus korupsi yang memang sering terjadi pada waktu itu.

Fenomena di atas melahirkan suatu kritik dari Mosca terhadap proses politik pada waktu itu berkaitan pemilu yang dikendalikan oleh aneka minoritas di setiap wilayah, parlemen yang bekerja dengan buruk, dalam ranah individual anggota parlemen sering ikut campur dalam urusan administrasi publik, pengadilan, serta pengendalian terhadap sektor ekonomi. Sedangkan dalam kasus pemilihan Mosca memiliki pandangan yang berbeda sangat paradoks yaitu besarnya jumlah pemilih maka hanya sebagian kecil pemilih tersebut yang menduduki jabatan politik. Sementara pemilih yang lain dalam jumlah besar bertindak sebagai pemilih yang obyektif setiap kandidat yang bersaing. Namun pada sisi lain Mosca berfikir bahwa pemerintah ataupun elite politik akan melakukan berbagai cara untuk dapat menarik simpatisan dari massa yang dapat digunakan untuk tetap mempertahankan kekuasaan.

Mosca selalu percaya bahwa pemerintahan yang dianggap demokratis di Eropa sendiri pun pada dasarnya selalu dipimpin oleh para elite, dan selalu percaya bahwa kekuasaan pemerintah akan terkonsentrasi ditangan sebagian kecil saja penguasa yang bertindak untuk kepentingan pribadi tetapi dalam realitas pelaksanaannya elite tidak selalu berkuasa melalui kekuatan ataupun kecurangan tetapi mewakili dalam satu

pengertian, kepentingan, dan juga tujuan dari kelompok yang berpengaruh di masyarakat.

Elite dan kekuasaan memang tidak bisa dipisahkan dimana elite yang berhasil memiliki kekuasaan secara otomatis mendapatkan pengakuan dari masyarakat, ketika suatu kekuasaan sudah didapatkan maka sifat dasar dari manusia yaitu untuk selalu mempertahankan dan melestarikan kekuasaan itu dan para aktor politik ini akan memaksa masyarakat untuk ikut tunduk akan aturan dan kebijakan yang telah dibuat. (Marlinda Irawati, 2021).

Fenomena kekuasaan Elite diatas memang tidak terlepas karena adanya sifat yang menyenangkan dan juga ketergantungan akan kekuasaan, maka pandangan dari Laswell dan Mills berkaitan dengan elite adalah setiap yang bisa bergerak dan berubah secara elastis. Sedangkan Mills menjelaskan keterkaitan antara elite dan kekuasaan bahwasanya elite yang berasal individu merupakan pranata utama dari kelompok masyarakat. Individu yang tergabung dalam kelompok elite menurut Mills merupakan golongan yang sangat terpadu, homogen, dan saling berkaitan satu dengan lainnya (Salsabilah & Putri, 2022).

Penjelasan dan pemaparan tentang teori kekuasaan elite dari Haryanto di atas, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis tentang sebagian kecil kelompok yang memerintah mayoritas di dalam sebuah sistem kehidupan masyarakat seperti di Desa Sumpinghayu dalam sebuah institusi politik atau pemerintahan oleh Keluarga Sanen yang

menjadi elite memerintah mayoritas masyarakat desa dikarenakan kemampuan elite dalam membangun kekuasaan.

Mengidentifikasi kekuasaan elite untuk mengetahui tentang bagaimana elite ini bekerja dan terbentuk dilakukan melalui 3 cara analisis yaitu analisis posisi dalam analisis bersumber pada struktur pemerintahan yang formal dan mengetahui tentang bagaimana hubungan yang terjalin melalui peta kekuasaan. Kemudian yang ke dua adalah analisis reputasi dimana dalam analisis ini hanya bersumber terhadap reputasi individu yang benar - benar dapat mempengaruhi masyarakat secara utama. Dan yang terakhir adalah analisis keputusan yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui elite yang memiliki kuasa terhadap elite lainnya dan digunakan untuk mengetahui alur antar satu elite dengan elite lainnya.

Fenomena elite yang ada selalu di barengi dengan legitimasi yang muncul baik secara langsung dari masyarakat ataupun sesama elite lainnya. Legitimasi ini sebagai bentuk pengakuan dan pemaknaan terhadap seorang individu yang dianggap memiliki keunggulan yang lebih di bandingkan dengan lainnya. Pandangan Max Weber dalam (Haryanto, 2017) tentang legitimasi kekuasaan elite terbagi menjadi tiga bentuk yaitu yang pertama adalah *traditionl domination* tradisi pengakuan terhadap elite yang berlaku secara lama dan dilakukan secara lama dan berkala oleh masyarakat. Kemudian yang ke dua adalah *charismatic domination* dimana legitimasi ini merupakan bentuk pengakuan yang didasarkan terhadap karisma yang dimiliki oleh seorang individu ataupun kelompok. Dan yang terakhir adalah

legitimasi *legal-rational domination* bentuk legitimasi dan pengakuan dari kesepakatan masyarakat yang dibuat terhadap aturan yang dibuat dan di undangkan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Maksud dari kerangka pemikiran diatas ialah, dinasti politik kepala desa Sanen dipemerintahan desa sumpinghayu sebagai permasalahan yang diteliti merupakan pokok utama dari penelitian ini, dimana dinasti politik diatas akan dianalisis menggunakan teori yang merupakan teori pendukung analisis penelitian ini, teori pertama yaitu teori modal dari Bourdie sebagai teori utama yang menganalisis berkaitan dengan bagaimana penggunaan modal kepala desa dalam membentuk dinasti politik, dan teori ke dua yaitu teori Kekuasaan Elite yang akan menganalisis berkaitan dengan bagaimana kekuasaan itu diperoleh serta di

pertahankan oleh kepala desa Sanen, serta menjelaskan tentang fenomena di kehidupan masyarakat bahwa terdapat dua bentuk kekuasaan yang mana minoritas memimpin mayoritas dan mayoritas yang dipimpin oleh minoritas hal ini senada dengan masyarakat desa sumpinghayu yang mana dipimpin oleh kelompok kecil atau minoritas dari keluarga besar Kepala Desa Sanen.

Hasil analisis dari fenomena dan juga teori yang digunakan maka akan menghasilkan suatu identifikasi kerangka yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu pertama tentang apa saja modal yang digunakan dalam praktik dinasti politik kepala desa Sanen, ke dua berkaitan dengan strategi mempertahankan kekuasaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sanen sehingga terbentuk dinasti politik dan ke tiga yaitu kepentingan elite lokal hal ini berkaitan tentang bagaimana kekuasaan yang terbentuk berdasarkan pada kepentingan elite lokal di Desa Sumpinghayu terutama dalam hal ini adalah kepala desa Sanen yang berperan sebagai elite. Dimana ke tiga poin diatas merupakan analisis yang akan menghasilkan suatu kesimpulan yaitu bagaimana terbentuknya dinasti politik berdasarkan modal kekuasaan Kepala Desa Sumpinghayu Sanen.